



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.909, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN. Kapasitas Fiskal  
Daerah. Pemetaan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244/PMK.07/2011  
TENTANG  
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2011;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
3. Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal dapat digunakan untuk:
  - a. pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah;
  - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
  - c. penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/atau
  - d. hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal terdiri dari Peta Kapasitas Fiskal Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota.

## Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- a. penghitungan Kapasitas Fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; dan
- b. penghitungan indeks Kapasitas Fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

## Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KF = \frac{(PAD + DBH + DAU + LP) - BP}{\text{Jumlah penduduk miskin}}$$

KF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

LP = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BP = Belanja Pegawai

- (2) Jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010.
- (3) Penghitungan Kapasitas Fiskal didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2010.
- (4) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing daerah provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal seluruh daerah provinsi.
- (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal masing-masing daerah kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata kapasitas fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.
- (6) Berdasarkan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), daerah dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:
- a. daerah yang indeks kapasitas fiskalnya lebih dari atau sama dengan 2 (indeks  $\geq 2$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi;

- b. daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari atau sama dengan 1 sampai kurang dari 2 ( $1 \leq \text{indeks} < 2$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Tinggi;
- c. daerah yang indeks kapasitas fiskalnya antara lebih dari 0,5 sampai kurang dari 1 ( $0,5 < \text{indeks} < 1$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Sedang; dan
- d. daerah yang indeks kapasitas fiskalnya kurang dari atau sama dengan 0,5 ( $\text{indeks} < 0,5$ ) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Rendah.

#### Pasal 5

Peta Kapasitas Fiskal masing-masing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Peta Kapasitas Fiskal Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.07/2010 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2011  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244 /PMK.07/2011  
TENTANG  
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

PETA KAPASITAS FISKAL PROVINSI

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
1	Provinsi Aceh	0,4592	Rendah
2	Provinsi Sumatera Utara	0,4091	Rendah
3	Provinsi Sumatera Barat	0,5562	Sedang
4	Provinsi Riau	1,2226	Tinggi
5	Provinsi Jambi	0,9493	Sedang
6	Provinsi Sumatera Selatan	0,4179	Rendah
7	Provinsi Bengkulu	0,4040	Rendah
8	Provinsi Lampung	0,2268	Rendah
9	Provinsi DKI Jakarta	7,3106	Sangat Tinggi
10	Provinsi Jawa Barat	0,3488	Rendah
11	Provinsi Jawa Tengah	0,2074	Rendah
12	Provinsi DI Yogyakarta	0,3531	Rendah
13	Provinsi Jawa Timur	0,2827	Rendah
14	Provinsi Kalimantan Barat	0,6476	Sedang
15	Provinsi Kalimantan Tengah	1,3811	Tinggi
16	Provinsi Kalimantan Selatan	1,6699	Tinggi
17	Provinsi Kalimantan Timur	4,3799	Sangat Tinggi
18	Provinsi Sulawesi Utara	0,6334	Sedang
19	Provinsi Sulawesi Tengah	0,3556	Rendah
20	Provinsi Sulawesi Selatan	0,4264	Rendah
21	Provinsi Sulawesi Tenggara	0,3672	Rendah
22	Provinsi Bali	1,6008	Tinggi
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	0,1719	Rendah
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0,1303	Rendah
25	Provinsi Maluku	0,2798	Rendah
26	Provinsi Papua	0,2742	Rendah
27	Provinsi Maluku Utara	0,9279	Sedang
28	Provinsi Banten	0,7440	Sedang
29	Provinsi Bangka Belitung	1,4498	Tinggi
30	Provinsi Gorontalo	0,4432	Rendah
31	Provinsi Kepulauan Riau	2,1995	Sangat Tinggi
32	Provinsi Papua Barat	1,2978	Tinggi
33	Provinsi Sulawesi Barat	0,4722	Rendah

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 244/PMK.07/2011  
TENTANG  
PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

## PETA KAPASITAS FISKAL KABUPATEN/KOTA

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Provinsi Aceh</b>		
1	Kabupaten Aceh Barat	0,1874	Rendah
2	Kabupaten Aceh Besar	0,1955	Rendah
3	Kabupaten Aceh Selatan	0,2852	Rendah
4	Kabupaten Aceh Singkil	0,4936	Rendah
5	Kabupaten Aceh Tengah	0,4015	Rendah
6	Kabupaten Aceh Tenggara	0,3840	Rendah
7	Kabupaten Aceh Timur	0,1688	Rendah
8	Kabupaten Aceh Utara	0,1897	Rendah
9	Kabupaten Bireuen	0,0661	Rendah
10	Kabupaten Pidie	0,0982	Rendah
11	Kabupaten Simeulue	0,5429	Sedang
12	Kota Banda Aceh	0,7937	Sedang
13	Kota Sabang	1,6561	Tinggi
14	Kota Langsa	0,2244	Rendah
15	Kota Lhokseumawe	0,6521	Sedang
16	Kabupaten Gayo Lues	1,0732	Tinggi
17	Kabupaten Aceh Barat Daya	0,3757	Rendah
18	Kabupaten Aceh Jaya	0,6309	Sedang
19	Kabupaten Nagan Raya	0,3086	Rendah
20	Kabupaten Aceh Tamiang	0,2177	Rendah
21	Kabupaten Bener Meriah	0,3563	Rendah
22	Kota Subulussalam	0,6883	Sedang
23	Kabupaten Pidie Jaya	0,3309	Rendah
<b>II</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>		
1	Kabupaten Asahan	0,2654	Rendah
2	Kabupaten Dairi	0,3636	Rendah
3	Kabupaten Deli Serdang	0,3076	Rendah
4	Kabupaten Karo	0,2028	Rendah
5	Kabupaten Labuhan Batu	0,2064	Rendah
6	Kabupaten Langkat	0,2150	Rendah
7	Kabupaten Mandailing Natal	0,2413	Rendah
8	Kabupaten Nias	0,3411	Rendah
9	Kabupaten Simalungun	0,0913	Rendah
10	Kabupaten Tapanuli Selatan	0,4352	Rendah
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	0,1781	Rendah
12	Kabupaten Tapanuli Utara	0,2772	Rendah
13	Kabupaten Toba Samosir	0,4208	Rendah
14	Kota Binjai	0,5326	Sedang
15	Kota Medan	0,3505	Rendah
16	Kota Pematang Siantar	0,2727	Rendah
17	Kota Sibolga	0,8551	Sedang
18	Kota Tanjung Balai	0,5176	Sedang
19	Kota Tebing Tinggi	0,4826	Rendah
20	Kota Padang Sidempuan	0,3111	Rendah
21	Kabupaten Pakpak Barat	1,8159	Tinggi
22	Kabupaten Nias Selatan	0,2397	Rendah
23	Kabupaten Humbang Hasundutan	0,6075	Sedang
24	Kabupaten Serdang Bedagai	0,2634	Rendah
25	Kabupaten Samosir	0,6678	Sedang
26	Kabupaten Batu Bara	0,3262	Rendah
27	Kabupaten Padang Lawas	0,5584	Sedang
28	Kabupaten Padang Lawas Utara	0,5883	Sedang
29	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	0,4026	Rendah
30	Kabupaten Labuhanbatu Utara	0,3047	Rendah
31	Kabupaten Nias Utara	0,1123	Rendah
32	Kabupaten Nias Barat	0,1104	Rendah
33	Kota Gunung Sitoli	0,0495	Rendah
<b>III</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>		
1	Kabupaten Lima Puluh Kota	0,2111	Rendah
2	Kabupaten Agam	0,1420	Rendah
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1,2731	Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
4	Kabupaten Padang Pariaman	0,3524	Rendah
5	Kabupaten Pasaman	0,3171	Rendah
6	Kabupaten Pesisir Selatan	0,3446	Rendah
7	Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	0,7179	Sedang
8	Kabupaten Solok	0,2569	Rendah
9	Kabupaten Tanah Datar	0,1703	Rendah
10	Kota Bukit Tinggi	1,0156	Tinggi
11	Kota Padang Panjang	3,0193	Sangat Tinggi
12	Kota Padang	0,2791	Rendah
13	Kota Payakumbuh	0,6089	Sedang
14	Kota Sawahlunto	5,6079	Sangat Tinggi
15	Kota Solok	2,1860	Sangat Tinggi
16	Kota Pariaman	2,2557	Sangat Tinggi
17	Kabupaten Pasaman Barat	0,3770	Rendah
18	Kabupaten Dharmas Raya	0,4855	Rendah
19	Kabupaten Solok Selatan	0,7776	Sedang
<b>IV</b>	<b>Provinsi Riau</b>		
1	Kabupaten Bengkalis	4,1427	Sangat Tinggi
2	Kabupaten Indragiri Hilir	0,8167	Sedang
3	Kabupaten Indragiri Hulu	1,0946	Tinggi
4	Kabupaten Kampar	0,6800	Sedang
5	Kabupaten Kuantan Singingi	0,7675	Sedang
6	Kabupaten Pelalawan	1,0812	Tinggi
7	Kabupaten Rokan Hilir	1,7292	Tinggi
8	Kabupaten Rokan Hulu	0,5770	Sedang
9	Kabupaten Siak	4,8456	Sangat Tinggi
10	Kota Dumai	1,9174	Tinggi
11	Kota Pekanbaru	0,9135	Sedang
12	Kabupaten Kepulauan Meranti	0,2710	Rendah
<b>V</b>	<b>Provinsi Jambi</b>		
1	Kabupaten Batanghari	0,6518	Sedang
2	Kabupaten Bungo	0,9206	Sedang
3	Kabupaten Kerinci	1,0065	Tinggi
4	Kabupaten Merangin	0,6258	Sedang
5	Kabupaten Muaro Jambi	0,8978	Sedang
6	Kabupaten Sarolangun	0,8616	Sedang
7	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1,3301	Tinggi
8	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1,3650	Tinggi
9	Kabupaten Tebo	1,0480	Tinggi
10	Kota Jambi	0,2833	Rendah
11	Kota Sungai Penuh	5,9088	Sangat Tinggi
<b>VI</b>	<b>Provinsi Sumatera Selatan</b>		
1	Kabupaten Lahat	0,3778	Rendah
2	Kabupaten Musi Banyuasin	0,9951	Sedang
3	Kabupaten Musi Rawas	0,4474	Rendah
4	Kabupaten Muara Enim	0,4581	Rendah
5	Kabupaten Ogan Komering Ilir	0,3037	Rendah
6	Kabupaten Ogan Komering Ulu	0,4618	Rendah
7	Kota Palembang	0,2751	Rendah
8	Kota Prabumulih	1,2040	Tinggi
9	Kota Pagar Alam	1,5916	Tinggi
10	Kota Lubuk Linggau	0,7696	Sedang
11	Kabupaten Banyuasin	0,3224	Rendah
12	Kabupaten Ogan Ilir	0,3690	Rendah
13	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	0,3579	Rendah
14	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	0,6174	Sedang
15	Kabupaten Empat Lawang	0,6643	Sedang
<b>VII</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>		
1	Kabupaten Bengkulu Selatan	0,2269	Rendah
2	Kabupaten Bengkulu Utara	0,2641	Rendah
3	Kabupaten Rejang Lebong	0,2768	Rendah
4	Kota Bengkulu	0,1421	Rendah
5	Kabupaten Kaur	0,4589	Rendah
6	Kabupaten Seluma	0,2557	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
7	Kabupaten Mukomuko	0,4933	Rendah
8	Kabupaten Lebong	0,9169	Sedang
9	Kabupaten Kepahiang	0,6668	Sedang
10	Kabupaten Bengkulu Tengah	2,2319	Sangat Tinggi
<b>VIII</b>	<b>Provinsi Lampung</b>		
1	Kabupaten Lampung Barat	0,2261	Rendah
2	Kabupaten Lampung Selatan	0,0753	Rendah
3	Kabupaten Lampung Tengah	0,0667	Rendah
4	Kabupaten Lampung Utara	0,0631	Rendah
5	Kabupaten Lampung Timur	0,0891	Rendah
6	Kabupaten Tanggamus	0,1797	Rendah
7	Kabupaten Tulang Bawang	0,3465	Rendah
8	Kabupaten Way Kanan	0,1630	Rendah
9	Kota Bandar Lampung	0,0582	Rendah
10	Kota Metro	0,4830	Rendah
11	Kabupaten Pesawaran	0,1706	Rendah
12	Kabupaten Pringsewu	0,0465	Rendah
13	Kabupaten Mesuji	0,5780	Sedang
14	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,2838	Rendah
<b>IX</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>		
1	Kabupaten Bandung	0,1793	Rendah
2	Kabupaten Bekasi	0,4628	Rendah
3	Kabupaten Bogor	0,2160	Rendah
4	Kabupaten Ciamis	0,1247	Rendah
5	Kabupaten Cianjur	0,0986	Rendah
6	Kabupaten Cirebon	0,0964	Rendah
7	Kabupaten Garut	0,0941	Rendah
8	Kabupaten Indramayu	0,1440	Rendah
9	Kabupaten Karawang	0,2144	Rendah
10	Kabupaten Kuningan	0,1141	Rendah
11	Kabupaten Majalengka	0,1309	Rendah
12	Kabupaten Purwakarta	0,2400	Rendah
13	Kabupaten Subang	0,1474	Rendah
14	Kabupaten Sukabumi	0,1532	Rendah
15	Kabupaten Sumedang	0,1754	Rendah
16	Kabupaten Tasikmalaya	0,1593	Rendah
17	Kota Bandung	0,7424	Sedang
18	Kota Bekasi	0,3281	Rendah
19	Kota Bogor	0,3343	Rendah
20	Kota Cirebon	0,6444	Sedang
21	Kota Depok	0,9834	Sedang
22	Kota Sukabumi	0,5566	Sedang
23	Kota Tasikmalaya	0,1254	Rendah
24	Kota Cimahi	0,4890	Rendah
25	Kota Banjar	0,9684	Sedang
26	Kabupaten Bandung Barat	0,1461	Rendah
<b>X</b>	<b>Provinsi Jawa Tengah</b>		
1	Kabupaten Banjarnegara	0,1104	Rendah
2	Kabupaten Banyumas	0,0565	Rendah
3	Kabupaten Batang	0,0718	Rendah
4	Kabupaten Blora	0,0874	Rendah
5	Kabupaten Boyolali	0,1060	Rendah
6	Kabupaten Brebes	0,0576	Rendah
7	Kabupaten Cilacap	0,0963	Rendah
8	Kabupaten Demak	0,0916	Rendah
9	Kabupaten Grobogan	0,0923	Rendah
10	Kabupaten Jepara	0,2892	Rendah
11	Kabupaten Karanganyar	0,0655	Rendah
12	Kabupaten Kebumen	0,0294	Rendah
13	Kabupaten Kendal	0,1826	Rendah
14	Kabupaten Klaten	0,0409	Rendah
15	Kabupaten Kudus	0,3663	Rendah
16	Kabupaten Magelang	0,0763	Rendah
17	Kabupaten Pati	0,1029	Rendah
18	Kabupaten Pekalongan	0,0808	Rendah



No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
19	Kabupaten Pemalang	0,0612	Rendah
20	Kabupaten Purbalingga	0,0603	Rendah
21	Kabupaten Purworejo	0,0725	Rendah
22	Kabupaten Rembang	0,0895	Rendah
23	Kabupaten Semarang	0,1717	Rendah
24	Kabupaten Sragen	0,1119	Rendah
25	Kabupaten Sukoharjo	0,1503	Rendah
26	Kabupaten Tegal	0,1065	Rendah
27	Kabupaten Temanggung	0,1417	Rendah
28	Kabupaten Wonogiri	0,0361	Rendah
29	Kabupaten Wonosobo	0,0855	Rendah
30	Kota Magelang	0,7526	Sedang
31	Kota Pekalongan	0,5179	Sedang
32	Kota Salatiga	0,6793	Sedang
33	Kota Semarang	0,7368	Sedang
34	Kota Surakarta	0,2996	Rendah
35	Kota Tegal	0,5289	Sedang
<b>XI</b>	<b>Provinsi DI Yogyakarta</b>		
1	Kabupaten Bantul	0,1304	Rendah
2	Kabupaten Gunung Kidul	0,0422	Rendah
3	Kabupaten Kulon Progo	0,0672	Rendah
4	Kabupaten Sleman	0,1342	Rendah
5	Kota Yogyakarta	0,3719	Rendah
<b>XII</b>	<b>Provinsi Jawa Timur</b>		
1	Kabupaten Bangkalan	0,0946	Rendah
2	Kabupaten Banyuwangi	0,1634	Rendah
3	Kabupaten Blitar	0,1124	Rendah
4	Kabupaten Bojonegoro	0,1635	Rendah
5	Kabupaten Bondowoso	0,1328	Rendah
6	Kabupaten Gresik	0,1784	Rendah
7	Kabupaten Jember	0,1088	Rendah
8	Kabupaten Jombang	0,1516	Rendah
9	Kabupaten Kediri	0,1063	Rendah
10	Kabupaten Lamongan	0,0894	Rendah
11	Kabupaten Lumajang	0,1338	Rendah
12	Kabupaten Madiun	0,1445	Rendah
13	Kabupaten Magetan	0,1540	Rendah
14	Kabupaten Malang	0,1309	Rendah
15	Kabupaten Mojokerto	0,1313	Rendah
16	Kabupaten Nganjuk	0,0723	Rendah
17	Kabupaten Ngawi	0,0546	Rendah
18	Kabupaten Pacitan	0,0908	Rendah
19	Kabupaten Pamekasan	0,1384	Rendah
20	Kabupaten Pasuruan	0,1280	Rendah
21	Kabupaten Ponorogo	0,1303	Rendah
22	Kabupaten Probolinggo	0,0612	Rendah
23	Kabupaten Sampang	0,0866	Rendah
24	Kabupaten Sidoarjo	0,4095	Rendah
25	Kabupaten Situbondo	0,1437	Rendah
26	Kabupaten Sumenep	0,0810	Rendah
27	Kabupaten Trenggalek	0,0780	Rendah
28	Kabupaten Tuban	0,1060	Rendah
29	Kabupaten Tulungagung	0,1904	Rendah
30	Kota Blitar	1,1735	Tinggi
31	Kota Kediri	1,1197	Tinggi
32	Kota Madiun	0,8516	Sedang
33	Kota Malang	0,6247	Sedang
34	Kota Mojokerto	1,8131	Tinggi
35	Kota Pasuruan	0,6047	Sedang
36	Kota Probolinggo	0,3761	Rendah
37	Kota Surabaya	0,6458	Sedang
38	Kota Batu	1,5757	Tinggi
<b>XIII</b>	<b>Provinsi Kalimantan Barat</b>		
1	Kabupaten Bengkayang	0,7681	Sedang
2	Kabupaten Landak	0,3100	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
3	Kabupaten Kapuas Hulu	1,4299	Tinggi
4	Kabupaten Ketapang	0,6339	Sedang
5	Kabupaten Pontianak	0,6550	Sedang
6	Kabupaten Sambas	0,3131	Rendah
7	Kabupaten Sanggau	0,8674	Sedang
8	Kabupaten Sintang	0,7696	Sedang
9	Kota Pontianak	0,5532	Sedang
10	Kota Singkawang	0,9171	Sedang
11	Kabupaten Sekadau	1,4611	Tinggi
12	Kabupaten Melawi	0,7501	Sedang
13	Kabupaten Kayong Utara	1,7477	Tinggi
14	Kabupaten Kubu Raya	0,5547	Sedang
<b>XIV</b>	<b>Provinsi Kalimantan Tengah</b>		
1	Kabupaten Barito Selatan	1,9695	Tinggi
2	Kabupaten Barito Utara	2,3572	Sangat Tinggi
3	Kabupaten Kapuas	0,8322	Sedang
4	Kabupaten Kotawaringin Barat	1,4411	Tinggi
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	0,8972	Sedang
6	Kota Palangka Raya	0,7502	Sedang
7	Kabupaten Katingan	2,6685	Sangat Tinggi
8	Kabupaten Seruyan	2,2359	Sangat Tinggi
9	Kabupaten Sukamara	7,1673	Sangat Tinggi
10	Kabupaten Lamandau	5,6153	Sangat Tinggi
11	Kabupaten Gunung Mas	2,2633	Sangat Tinggi
12	Kabupaten Pulang Pisau	2,2839	Sangat Tinggi
13	Kabupaten Murung Raya	4,3415	Sangat Tinggi
14	Kabupaten Barito Timur	1,4827	Tinggi
<b>XV</b>	<b>Provinsi Kalimantan Selatan</b>		
1	Kabupaten Banjar	1,1739	Tinggi
2	Kabupaten Barito Kuala	1,0823	Tinggi
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,7887	Sedang
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,8095	Sedang
5	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,9967	Sedang
6	Kabupaten Kota Baru	1,5666	Tinggi
7	Kabupaten Tabalong	2,0251	Sangat Tinggi
8	Kabupaten Tanah Laut	1,6673	Tinggi
9	Kabupaten Tapin	2,2247	Sangat Tinggi
10	Kota Banjar Baru	1,1905	Tinggi
11	Kota Banjarmasin	0,7931	Sedang
12	Kabupaten Balangan	1,7148	Tinggi
13	Kabupaten Tanah Bumbu	1,0736	Tinggi
<b>XVI</b>	<b>Provinsi Kalimantan Timur</b>		
1	Kabupaten Berau	5,7943	Sangat Tinggi
2	Kabupaten Bulungan	3,9730	Sangat Tinggi
3	Kabupaten Kutai	5,7935	Sangat Tinggi
4	Kabupaten Kutai Barat	4,6286	Sangat Tinggi
5	Kabupaten Kutai Timur	3,7412	Sangat Tinggi
6	Kabupaten Malinau	8,4267	Sangat Tinggi
7	Kabupaten Nunukan	3,1490	Sangat Tinggi
8	Kabupaten Pasir	2,8306	Sangat Tinggi
9	Kota Balikpapan	2,9530	Sangat Tinggi
10	Kota Bontang	6,0566	Sangat Tinggi
11	Kota Samarinda	1,6615	Tinggi
12	Kota Tarakan	2,5525	Sangat Tinggi
13	Kabupaten Penajam Paser Utara	3,7591	Sangat Tinggi
14	Kabupaten Tana Tidung	32,3598	Sangat Tinggi
<b>XVII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Utara</b>		
1	Kabupaten Bolaang Mongondow	0,3952	Rendah
2	Kabupaten Minahasa	0,2214	Rendah
3	Kabupaten Kepulauan Sangihe	0,7735	Sedang
4	Kota Bitung	0,5117	Sedang
5	Kota Manado	0,5090	Sedang
6	Kabupaten Kepulauan Talaud	1,2031	Tinggi
7	Kabupaten Minahasa Selatan	0,3879	Rendah
8	Kota Tomohon	1,1501	Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
9	Kabupaten Minahasa Utara	0,4929	Rendah
10	Kota Kotamobagu	1,6163	Tinggi
11	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2,3168	Sangat Tinggi
12	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1,6016	Tinggi
13	Kabupaten Minahasa Tenggara	0,7316	Sedang
14	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	2,5315	Sangat Tinggi
15	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1,2565	Tinggi
<b>XVIII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tengah</b>		
1	Kabupaten Banggai Kepulauan	0,3467	Rendah
2	Kabupaten Banggai	0,3867	Rendah
3	Kabupaten Buol	0,5768	Sedang
4	Kabupaten Toli-Toli	0,4033	Rendah
5	Kabupaten Donggala	0,2535	Rendah
6	Kabupaten Morowali	0,4612	Rendah
7	Kabupaten Poso	0,2380	Rendah
8	Kota Palu	0,2174	Rendah
9	Kabupaten Parigi Moutong	0,1874	Rendah
10	Kabupaten Tojo Una Una	0,4373	Rendah
11	Kabupaten Sigi	0,3988	Rendah
<b>XIX</b>	<b>Provinsi Sulawesi Selatan</b>		
1	Kabupaten Bantaeng	0,5909	Sedang
2	Kabupaten Barru	0,5513	Sedang
3	Kabupaten Bone	0,1321	Rendah
4	Kabupaten Bulukumba	0,2575	Rendah
5	Kabupaten Enrekang	0,2078	Rendah
6	Kabupaten Gowa	0,2178	Rendah
7	Kabupaten Jeneponto	0,2319	Rendah
8	Kabupaten Luwu	0,3501	Rendah
9	Kabupaten Luwu Utara	0,3356	Rendah
10	Kabupaten Maros	0,3174	Rendah
11	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	0,2081	Rendah
12	Kabupaten Pinrang	0,3805	Rendah
13	Kabupaten Selayar	0,5196	Sedang
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	0,6922	Sedang
15	Kabupaten Sinjai	0,2907	Rendah
16	Kabupaten Soppeng	0,2876	Rendah
17	Kabupaten Takalar	0,3249	Rendah
18	Kabupaten Tana Toraja	0,2743	Rendah
19	Kabupaten Wajo	0,3612	Rendah
20	Kota Pare Pare	1,6117	Tinggi
21	Kota Makassar	0,4788	Rendah
22	Kota Palopo	0,6820	Sedang
23	Kabupaten Luwu Timur	0,9264	Sedang
24	Kabupaten Toraja Utara	0,2576	Rendah
<b>XX</b>	<b>Provinsi Sulawesi Tenggara</b>		
1	Kabupaten Buton	0,2235	Rendah
2	Kabupaten Muna	0,1945	Rendah
3	Kabupaten Konawe	0,3078	Rendah
4	Kabupaten Kolaka	0,1944	Rendah
5	Kota Kendari	0,4193	Rendah
6	Kota Bau-Bau	0,7218	Sedang
7	Kabupaten Konawe Selatan	0,4672	Rendah
8	Kabupaten Bombana	0,5163	Sedang
9	Kabupaten Wakatobi	0,6191	Sedang
10	Kabupaten Kolaka Utara	0,6229	Sedang
11	Kabupaten Konawe Utara	2,5775	Sangat Tinggi
12	Kabupaten Buton Utara	1,9119	Tinggi
<b>XXI</b>	<b>Provinsi Bali</b>		
1	Kabupaten Badung	4,1647	Sangat Tinggi
2	Kabupaten Bangli	0,6018	Sedang
3	Kabupaten Buleleng	0,2327	Rendah
4	Kabupaten Gianyar	0,3818	Rendah
5	Kabupaten Jembrana	0,6358	Sedang
6	Kabupaten Karangasem	0,2855	Rendah

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
7	Kabupaten Klungkung	0,6634	Sedang
8	Kabupaten Tabanan	0,4300	Rendah
9	Kota Denpasar	1,5007	Tinggi
<b>XXII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>		
1	Kabupaten Bima	0,0750	Rendah
2	Kabupaten Dompu	0,1593	Rendah
3	Kabupaten Lombok Barat	0,0886	Rendah
4	Kabupaten Lombok Tengah	0,0976	Rendah
5	Kabupaten Lombok Timur	0,0715	Rendah
6	Kabupaten Sumbawa	0,1463	Rendah
7	Kota Mataram	0,1661	Rendah
8	Kota Bima	0,3646	Rendah
9	Kabupaten Sumbawa Barat	0,7733	Sedang
10	Kabupaten Lombok Utara	0,1694	Rendah
<b>XXIII</b>	<b>Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>		
1	Kabupaten Alor	0,2357	Rendah
2	Kabupaten Belu	0,1950	Rendah
3	Kabupaten Ende	0,1435	Rendah
4	Kabupaten Flores Timur	0,4005	Rendah
5	Kabupaten Kupang	0,1395	Rendah
6	Kabupaten Lembata	0,3015	Rendah
7	Kabupaten Manggarai	0,2254	Rendah
8	Kabupaten Ngada	0,6043	Sedang
9	Kabupaten Sikka	0,3353	Rendah
10	Kabupaten Sumba Barat	0,3528	Rendah
11	Kabupaten Sumba Timur	0,1796	Rendah
12	Kabupaten Timor Tengah Selatan	0,0744	Rendah
13	Kabupaten Timor Tengah Utara	0,1589	Rendah
14	Kota Kupang	0,2126	Rendah
15	Kabupaten Rote Ndao	0,2400	Rendah
16	Kabupaten Manggarai Barat	0,2729	Rendah
17	Kabupaten Nagekeo	0,6506	Sedang
18	Kabupaten Sumba Barat Daya	0,1438	Rendah
19	Kabupaten Sumba Tengah	0,6097	Sedang
20	Kabupaten Manggarai Timur	0,2222	Rendah
21	Kabupaten Sabu Raijua	0,1032	Rendah
<b>XXIV</b>	<b>Provinsi Maluku</b>		
1	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	0,3765	Rendah
2	Kabupaten Maluku Tengah	0,0991	Rendah
3	Kabupaten Maluku Tenggara	0,3605	Rendah
4	Kabupaten Buru	0,4229	Rendah
5	Kota Ambon	0,2734	Rendah
6	Kabupaten Seram Bagian Barat	0,2130	Rendah
7	Kabupaten Seram Bagian Timur	0,5425	Sedang
8	Kabupaten Kepulauan Aru	0,5635	Sedang
9	Kota Tual	1,0065	Tinggi
10	Kabupaten Maluku Barat Daya	0,5492	Sedang
11	Kabupaten Buru Selatan	1,2572	Tinggi
<b>XXV</b>	<b>Provinsi Papua</b>		
1	Kabupaten Biak Numfor	0,3352	Rendah
2	Kabupaten Jayapura	0,9208	Sedang
3	Kabupaten Jayawijaya	0,3172	Rendah
4	Kabupaten Merauke	1,9647	Tinggi
5	Kabupaten Mimika	1,8005	Tinggi
6	Kabupaten Nabire	0,4084	Rendah
7	Kabupaten Paniai	0,0750	Rendah
8	Kabupaten Puncak Jaya	0,5835	Sedang
9	Kabupaten Mamberamo Raya	5,5971	Sangat Tinggi
10	Kota Jayapura	0,4198	Rendah
11	Kabupaten Tolikara	0,4028	Rendah
12	Kabupaten Keerom	1,8411	Tinggi
13	Kabupaten Pegunungan Bintang	1,2208	Tinggi
14	Kabupaten Boven Digoel	3,2705	Sangat Tinggi
15	Kabupaten Mappi	1,2233	Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
16	Kabupaten Asmat	1,4793	Tinggi
17	Kabupaten Yahukimo	0,3596	Rendah
18	Kabupaten Waropen	2,5645	Sangat Tinggi
19	Kabupaten Sarmi	5,4130	Sangat Tinggi
20	Kabupaten Supiori	3,2816	Sangat Tinggi
21	Kabupaten Kepulauan Yapen	0,4793	Rendah
22	Kabupaten Mamberamo Tengah	1,2107	Tinggi
23	Kabupaten Yalimo	1,0577	Tinggi
24	Kabupaten Lanny Jaya	0,3405	Rendah
25	Kabupaten Nduga	0,7502	Sedang
26	Kabupaten Puncak	0,8517	Sedang
27	Kabupaten Dogiyai	0,3920	Rendah
28	Kabupaten Intan Jaya	0,7128	Sedang
29	Kabupaten Deiyai	0,2519	Rendah
<b>XXVI</b>	<b>Provinsi Maluku Utara</b>		
1	Kabupaten Halmahera Tengah	1,3799	Tinggi
2	Kabupaten Halmahera Barat	0,8103	Sedang
3	Kota Ternate	1,2485	Tinggi
4	Kabupaten Halmahera Timur	1,3932	Tinggi
5	Kabupaten Halmahera Utara	1,0232	Tinggi
6	Kabupaten Kepulauan Sula	1,1230	Tinggi
7	Kota Tidore Kepulauan	1,9343	Tinggi
8	Kabupaten Halmahera Selatan	1,0277	Tinggi
9	Kabupaten Pulau Morotai	0,9416	Sedang
<b>XXVII</b>	<b>Provinsi Banten</b>		
1	Kabupaten Lebak	0,1927	Rendah
2	Kabupaten Pandeglang	0,0767	Rendah
3	Kabupaten Serang	0,2128	Rendah
4	Kabupaten Tangerang	0,2790	Rendah
5	Kota Cilegon	1,6697	Tinggi
6	Kota Tangerang	0,3305	Rendah
7	Kota Serang	0,3066	Rendah
8	Kota Tangerang Selatan	2,1550	Sangat Tinggi
<b>XXVIII</b>	<b>Provinsi Bangka Belitung</b>		
1	Kabupaten Bangka	0,6496	Sedang
2	Kabupaten Belitung	0,9086	Sedang
3	Kota Pangkal Pinang	1,2668	Tinggi
4	Kabupaten Bangka Selatan	1,3237	Tinggi
5	Kabupaten Bangka Tengah	1,0708	Tinggi
6	Kabupaten Bangka Barat	1,7488	Tinggi
7	Kabupaten Belitung Timur	1,3208	Tinggi
<b>XXIX</b>	<b>Provinsi Gorontalo</b>		
1	Kabupaten Boalemo	0,2887	Rendah
2	Kabupaten Gorontalo	0,1015	Rendah
3	Kota Gorontalo	1,4062	Tinggi
4	Kabupaten Pohuwato	0,4946	Rendah
5	Kabupaten Bone Bolango	0,3842	Rendah
6	Kabupaten Gorontalo Utara	0,5097	Sedang
<b>XXX</b>	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		
1	Kabupaten Karimun	2,0593	Sangat Tinggi
2	Kota Batam	0,5978	Sedang
3	Kota Tanjung Pinang	1,2562	Tinggi
4	Kabupaten Lingga	2,0444	Sangat Tinggi
5	Kabupaten Bintan	3,1739	Sangat Tinggi
6	Kabupaten Natuna	24,5433	Sangat Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	28,8985	Sangat Tinggi
<b>XXXI</b>	<b>Provinsi Papua Barat</b>		
1	Kabupaten Sorong	1,3312	Tinggi
2	Kabupaten Manokwari	0,4400	Rendah
3	Kabupaten Fak-Fak	1,1012	Tinggi
4	Kota Sorong	0,9668	Sedang
5	Kabupaten Raja Ampat	3,1653	Sangat Tinggi
6	Kabupaten Sorong Selatan	2,2279	Sangat Tinggi
7	Kabupaten Teluk Bintuni	1,7921	Tinggi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	2	3	4
8	Kabupaten Teluk Wondama	1,7604	Tinggi
9	Kabupaten Kaimana	3,0021	Sangat Tinggi
10	Kab. Tambrauw	4,2025	Sangat Tinggi
11	Kab. Maybrat	0,9353	Sedang
<b>XXXII</b>	<b>Provinsi Sulawesi Barat</b>		
1	Kabupaten Majene	0,2636	Rendah
2	Kabupaten Mamuju	0,5200	Sedang
3	Kabupaten Polewali Mandar	0,1496	Rendah
4	Kabupaten Mamasa	0,4651	Rendah
5	Kabupaten Mamuju Utara	1,5128	Tinggi

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO